

**PENGUMUMAN  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Maret 2023/Khusus - Awal Menjabat)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
**UNIT KERJA** : BADAN PENDAPATAN DAERAH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : SURRAHMAN SA`AT
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 901838

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 654.750.000

1. Tanah Seluas 1495 m2 di KAB / KOTA KAPUAS HULU, HASIL SENDIRI Rp. 74.750.000
2. Tanah Seluas 372 m2 di KAB / KOTA KAPUAS HULU, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
3. Bangunan Seluas 216 m2 di KAB / KOTA KAPUAS HULU, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. 87.000.000

1. MOBIL, XENIA MINIBUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
2. MOTOR, YAMAHA VEGA R 110 CC Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA**

Rp. 19.050.000

**D. SURAT BERHARGA**

Rp. ---

**E. KAS DAN SETARA KAS**

Rp. 74.113.166

**F. HARTA LAINNYA**

Rp. ---

**Sub Total**

Rp. 834.913.166

**III. HUTANG**

Rp. 280.859.753

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp. 554.053.413

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.